

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PADA PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

Felini Otnil Toporundeng¹, Rebecca Christy Mowilos², Giovanni Naharia³

¹²³,Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Kota Tondano

Corresponding author: felinitoporundeng@unima.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penentu yang ada pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Metode Penelitian yang digunakan ialah Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan PKH seperti standar dan sasaran kebijakan yang belum secara mendetail diketahui oleh para aparat pemerintah dan TKSK, sehingga mengakibatkan masih adanya KPM yang belum tepat sasaran. Kemudian minimnya kemauan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya dalam hal ini aparat pemerintah dan TKSK terhadap KPM PKH. Maka beberapa hal yang demikian bisa masuk pada faktor-faktor penentu yang mengakibatkan kegagalan. Komunikasi antara para implementor sudah berjalan dengan baik, bahkan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah kecamatan untuk menyampaikan bantuan sosial PKH kepada masyarakat sudah terbuka, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan keberhasilan program.

Kata kunci: Faktor, Penentu, Pelaksanaan, PKH, Minahasa

ABSTRACT

The Family Hope Program, abbreviated as PKH, is a conditional social assistance program for poor and vulnerable families or individuals registered in the integrated data of the poverty management program, processed by the Social Welfare Data and Information Center and designated as PKH beneficiary families. This study aims to determine, describe, and analyze the determining factors in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in North Kawangkoan District, Minahasa Regency. The research method used is Qualitative. The results of the study indicate that there are various factors that determine the success and failure of PKH implementation, such as standards and policy targets that are not yet known in detail by government officials and TKSK, resulting in the continued presence of KPM who are not on target. Then there is the lack of willingness to improve the competence of resources in this case government officials and TKSK towards PKH KPM. So several of these things can be included in the determining factors that lead to failure. Communication between implementers has been going well, even the attitude shown by the sub-district government in delivering PKH social assistance to the community has been open, so that this is one of the determining factors to increase the success of the program.

Keywords: Factors, Determinants, Implementation, PKH, Minahasa

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga sebagai program nasional secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan

pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian bagi KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sebagai program nasional yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor, pelaksanaan PKH tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi dan berbagai faktor yang ikut berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Senada dengan pandang Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:101) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 poin (1) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pasal 3 menjelaskan sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2007 dengan nama Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8 % pada tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan

kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Pedoman PKH, 2019).

Faktor penentu pelaksanaan PKH dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan atau regulasi, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi dan pemahaman keluarga penerima manfaat. Selain itu, faktor lingkungan sosial, budaya, dan kondisi geografis juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat daerah. Perbedaan karakteristik wilayah bisa berpotensi menyebabkan variasi dalam pelaksanaan PKH, sehingga hasil yang dicapai tidak selalu seragam.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Sosial ikut melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional kemudian disalurkan di tiap kecamatan yang ada, begitu juga di Kecamatan Kawangkoan Utara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa ada 230 penerima. Data tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH

No.	Desa/Kelurahan	KPM
1.	Kiawa Satu	20
2.	Kiawa Satu Barat	28
3.	Kiawa Satu Utara	21
4.	Kiawa Dua	21
5.	Kiawa Dua Barat	17
6.	Kiawa Dua Timur	41
7.	Talikuran	22
8.	Talikuran Barat	7
9.	Talikuran Utara	32
10.	Uner	21
Jumlah		230

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Sesuai dengan data yang ada pada tabel 1. dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Kawangkoan Utara yaitu adanya penerima yang sudah tidak layak, tetapi masih mendapatkan bantuan PKH, hal tersebut ditinjau dari segi ekonomi yang sebenarnya sudah tidak tergolong lagi dalam ekonomi rendah atau keluarga miskin. Pada kenyataan yang ada dilapangan ada keluarga atau masyarakat yang lebih layak dan memenuhi syarat sebagai penerima PKH bahkan dalam segi ekonomi tergolong ekonomi rendah atau miskin, tetapi belum masuk dalam anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Permasalahan lain yang muncul adalah pengetahuan aparat pemerintah terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial masih belum maksimal, dan kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah terkait proses penetapan. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penentu yang ada pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial bersyarat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak

campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. Untuk lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 6 orang. Teknik analisis data diantaranya ada Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*), Verifikasi Data (*Data Verification*), Kesimpulan (*Conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa faktor penentu yang bisa membuat suatu kebijakan itu berhasil dan tentunya faktor-faktor yang ada ikut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Makmur dan Thahier (2016:36) kebijakan publik akan memberikan manfaat bagi kehidupan suatu bangsa, negara, pemerintah dan masyarakat apabila dapat diimplemenetasikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, kenyataan yang menggambarkan bahwa implementasi kebijakan publik, kadang terjadi faktor penghambat yang dipikirkan atau diperkirakan tetapi menjadi faktor penguat, demikian pula sebaliknya. Jadi, suatu kebijakan mempunyai model-model implementasi yang ikut menentukan apakah kebijakan tersebut dapat berhasil atau tidak dan tentunya ada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2011:628) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang bisa dilihat dalam model implementasi yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan (2) kinerja kebijakan (3) sumber daya (4) komunikasi antar badan pelaksana (5) karakteristik badan pelaksana (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik (7) sikap pelaksana. Dari teori Meter dan Horn tersebut peneliti menggunakannya sebagai pisau penelitian dan mengadopsi empat model implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan sikap yang dijadikan sebagai subfokus atau indikator pada

guna mendapatkan informasi dari para informan yang ada untuk mendapatkan data penelitian ini.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2011:628) pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

Selain itu, menurut Makmur dan Thahier (2016:38) menjelaskan tentang kelompok sasaran kebijakan publik bahwa anggota masyarakat merupakan kelompok sasaran dalam mengimplementasikan suatu jenis kebijakan publik, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota masyarakat merupakan individu-individu yang memiliki keragaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran bagi kebijakan publik yang memiliki kemampuan dalam memahami materi kebijakan publik dan kerja sama dengan para implementor.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa standar dan sasaran kebijakan publik merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan yang tentunya harus dilihat secara detail baik itu terkait kelompok sasaran penerima kebijakan dan para implementor yang harus memahami secara jelas tentang suatu kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tidak salah sasaran dan kebijakan dapat berhasil.

Berikut hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan indikator Standar dan Sasaran Kebijakan:

Tabel 2. Temuan Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan

No.	Temuan
1.	Aparat pemerintah dan TKSK belum memahami secara jelas tujuan PKH
2.	Pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa dan TKSK belum memahami landasan regulasi yang dipakai pada PKH
3.	Kebijakan ini berhasil membantu perekonomian masyarakat

Dari tabel temuan diatas dapat dijelaskan pada indikator standar dan sasaran kebijakan didapati bahwa aparat pemerintah dan TKSK yang kurang mengetahui tujuan PKH dan juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan TKSK kurang memahami landasan regulasi yang dipakai pada PKH sehingga mengakibatkan adanya penerima yang belum tepat sasaran, sedangkan hal tersebut merupakan faktor penentu yang sangat penting dan mendasar. Kebijakan terkait PKH ini berhasil membantu perekonomian masyarakat miskin, karena melalui kebijakan publik yang dituangkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan bisa menjadi faktor penunjang untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia terlebih di Kabupaten Minahasa.

2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2011:628) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Kemudian, menurut Makmur dan Thahier (2016:351) sumber daya memiliki beraneka ragam jenis, bentuk, dan jumlahnya, tetapi kalau kita memodifikasi dari sekian banyak jenis, bentuk, dan jumlahnya sumber daya yang dimiliki organisasi publik, sesungguhnya dapat digolongkan secara garis besarnya menjadi dua golongan, yaitu yang pertama sumber daya yang berasal dari manusia dengan diistilahkan (human resources) yang memiliki jenis kelemahan dan jenis kekuatan yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan yang kedua sumber daya yang bukan manusia diistilahkan (non human resources) yang juga memiliki bentuk dan jenis yang sangat beragam.

Dari teori tersebut peneliti memahami bahwa sumber daya memiliki keberagaman jenis dan bentuk terbagi dalam sumber daya manusia dan bukan manusia yakni dalam bentuk uang, bahan pangan, dan dokumen yang berpotensi memberikan kekuatan ataupun kelemahan pada suatu pelaksanaan program atau kebijakan.

Berikut hasil temuan penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 3. Temuan Indikator Sumber Daya

No.	Temuan
1.	Kurangnya kepedulian aparat pemerintah dan TKSK terhadap informasi jumlah KPM PKH yang ada di Kecamatan Kawangkoan Utara
2.	Jumlah bantuan yang diterima bervariasi pada setiap komponen Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial
3.	Ketidaklengkapan berkas administrasi KPM PKH
4.	Banyaknya KPM PKH yang tidak mengambil bantuan sampai tiga bulan, sehingga diblokir atau diberhentikan

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa masih kurangnya kepedulian aparat pemerintah dan TKSK terhadap informasi jumlah KPM PKH yang ada di Kecamatan Kawangkoan Utara karena pernyataan mereka bisa dilihat bahwa tidak mengetahui berapa jumlah penerima PKH yang ada di kecamatan Kawangkoan Utara. Kemudian jumlah bantuan yang diterima bervariasi pada setiap komponen Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial. Didapati juga adanya ketidaklengkapan berkas administrasi KPM PKH yang menghambat proses validasi dan banyaknya penerima manfaat PKH yang tidak mengambil bantuan sampai tiga bulan sehingga diblokir atau diberhentikan karena berada diluar kampung seperti kebun.

3. Komunikasi

Komunikasi antar badan pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2011:628) menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Kemudian menurut George C. Edwards III (dalam Nawawi, 2009:138) menjelaskan tentang komunikasi merupakan Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan implementasi

kebijakan publik bahwa setiap implementor harus berkoordinasi secara baik, mengetahui secara spesifik tentang aturan yang ditetapkan dan harus sering melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori tersebut ada beberapa temuan yang ditemukan oleh peneliti seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Temuan Indikator Komunikasi

No.	Temuan
1.	Koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pendamping sudah berjalan dengan baik
2.	Kurangnya forum pertemuan musyawarah atau sosialisasi kepada KPM PKH
3.	Masyarakat tidak terlalu proaktif dalam mengemukakan pendapat terkait dengan permasalahan KPM PKH

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pendamping sudah berjalan dengan baik yang dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pendamping atau petugas yang datang setiap bulan di kantor kecamatan, untuk memberikan laporan dan evaluasi, tetapi ternyata forum pertemuan musyawarah atau sosialisasi yang diberikan kepada KPM PKH masih kurang, sehingga masyarakat masih kurang proaktif dalam menyuarakan pendapat terkait PKH, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh para informan.

4. Sikap

Tindakan atau karakter para implementor kebijakan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2011:628) menjelaskan bahwa sikap pelaksana menjadi variabel atau faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sehingga dapat dilihat model ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu faktor atau variabel dapat mempengaruhi faktor yang lain.

Menurut Edwards III (dalam Nawawi, 2009:138) menjelaskan bahwa Disposisi (sikap) merupakan suatu disposisi dalam implementasi adalah

karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.

Selain itu, menurut Makmur dan Thahier (2016:250) menjelaskan tentang perilaku yang adalah suatu bentuk pemikiran dan tindakan serta perasaan seseorang atau beberapa orang dengan berproses secara fundamental dan terus-menerus dengan dilakukan berdasarkan keteraturan tertentu terhadap seluruh elemen alam semesta termasuk interaksi dengan sesama manusia, terentuknya perilaku (behavior) sesungguhnya berproses secara terus-menerus dalam diri sehingga membentuk suatu kebiasaan yang sifatnya relatif lebih fundamental, kemudian diwujudkan dalam bentuk penampilan sebagai indikator penilaian perilaku seseorang. Karena Dye dalam Hakim (2011:114) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah publik.

Sesuai teori tersebut peneliti bisa menjelaskan bahwa sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan yang dilakukan para implementor harus benar-benar terarah, mempunyai etika, dan jujur yang sesuai dengan kebijakan sehingga tidak menyimpang dari petunjuk teknis dan SOP yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori ditemukan seperti yang ada pada tabel temuan berikut ini:

Tabel 5. Temuan Indikator Sikap

No.	Temuan
1.	Pemerintah Kecamatan menyampaikan bantuan PKH kepada masyarakat secara terbuka
2.	KPM PKH yang mengeluhkan penempelan stiker dirumah penerima
3.	Masyarakat merasa senang terkait bantuan PKH karena membantu perekonomian keluarga

Berdasarkan tabel temuan tersebut bisa dijelaskan bahwa memang pemerintah kecamatan sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait bantuan PKH baik itu melalui penempelan stiker dirumah

KPM PKH tetapi ada KPM PKH yang mengeluhkan tentang penempelan stiker tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor penentu yang ada pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa ada berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan PKH seperti standar dan sasaran kebijakan yang belum secara mendetail diketahui oleh para aparat pemerintah dan TKS, sehingga mengakibatkan masih adanya KPM yang belum tepat sasaran. Kemudian minimnya kemauan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya dalam hal ini aparat pemerintah dan TKS terhadap KPM PKH. Maka beberapa hal yang demikian bisa masuk pada faktor-faktor penentu yang mengakibatkan kegagalan. Komunikasi antara para implementor sudah berjalan dengan baik, bahkan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah kecamatan untuk menyampaikan bantuan sosial PKH kepada masyarakat sudah terbuka, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hakim, Lukman. (2011). Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Makmur & Thahier, Rohana. (2016). Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, Ismail. (2009). Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
- Nugroho, Riant. (2011). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Medpress.